

**IDENTIFIKASI *STARTING CONDITION* DALAM PRAKTIK
COLLABORATIVE GOVERNANCE MITIGASI KONFLIK
SATWA LIARDENGAN MASYARAKAT di SEKITAR TAMAN
NASIONAL WAY KAMBAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

**BAYU CINDI KATON
1716041012**



**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**IDENTIFIKASI *STARTING CONDITION* DALAM PRAKTIK
COLLABORATIVE GOVERNANCE MITIGASI KONFLIK
SATWA LIARDENGAN MASYARAKAT di SEKITAR TAMAN
NASIONAL WAY KAMBAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh

BAYU CINDI KATON

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IDENTIFIKASI *STARTING CONDITION* DALAM PRAKTIK *COLLABORATIVE GOVERNANCE* MENGATASI MITIGASI KONFLIKSATWA LIAR DENGAN MASYARAKAT DI SEKITAR TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Oleh

Bayu Cindi Katon

Konflik mengenai satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur menyebabkan kerugian bagi masyarakat desapenyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas dan satwa liar itu sendiri. Baik kerugian berupa ekonomi maupun tempat hidup satwa liar itu sendiri. Upaya penanganan konflik satwa liar dengan manusia dapat dilaksanakan melalui praktik *collaborative governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat mengenai *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil identifikasi penelitian *starting condition* dalam praktik *collaboratif governance* mengatasi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas menunjukkan adanya kesiapan untuk melakukan kolaborasi. Hal tersebut didukung dengan adanya sumber daya yang seimbang, insentif yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan dalam mengendalikan konflik yang terjadi di internal organisasi. Selanjutnya dalam kolaborasi terdapat faktor penghambat meliputi sumber daya yang melimpah menjadi ancaman tersendiri dan luasnya lahan yang sulit untuk di kontrol. Adapun faktor pendukungnya yaitu tersedianya area untuk berkolaborasi, dukungan pemerintah, partisipasi perguruan tinggi, dan tersedianya *stakeholders*.

Kata kunci : *Starting Condition*, *Collaborative Governance*, Mitigasi Konflik

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF STARTING CONDITIONS IN COLLABORATIVE GOVERNANCE PRACTICES ADDRESSING THE MITIGATION OF WILDLIFE CONFLICTS WITH COMMUNITIES AROUND WAY KAMBAS NATIONAL PARK

BY

Bayu Cindi Katon

Conflicts regarding wildlife with the community around Way Kambas National Park of East Lampung Regency caused harm to the buffer village communities around Way Kambas National Park and the wildlife itself. Both the loss in the form of the economy and the place of wildlife itself. Efforts to deal with wildlife conflicts with humans can be implemented through collaborative governance practices.

This research aims to identify and identify supporting factors and obstacles regarding starting conditions in collaborative governance practices to mitigate wildlife conflicts with communities around Way Kambas National Park. The method used is descriptive qualitative research of data collection with interviews, observations, and documentation.

The results of the identification of starting condition research in collaborative governance practices to overcome the mitigation of wildlife conflicts with the community around Way Kambas National Park show a readiness to collaborate. This is supported by balanced resources, incentives provided in accordance with applicable provisions and the ability to control conflicts that occur within the organization. In collaboration, there are inhibitory factors including abundant resources being a threat in itself and the extent of land that is difficult to control. The supporting factors are the availability of areas for collaboration, government support, college participation, and the availability of stakeholders.

Keywords : Starting Condition, Collaborative Governance, Conflict Mitigation

Judul Skripsi : **Identifikasi *Starting Condition* Dalam Praktik Collaborative Governance Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur**

Nama Mahasiswa : **Bayu Cindi Katon**

No. Pokok Mahasiswa : **1716041012**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.
NIP. 19710122 199512 2 001

Meiliyana, S.I.P., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

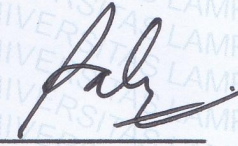
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.I.P., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

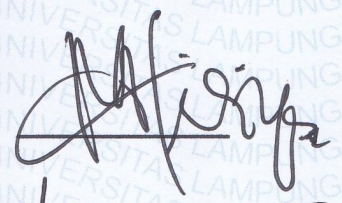
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

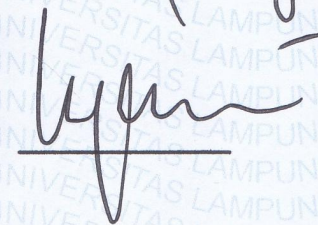
Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.



Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Bayu Cindi Katon
NPM 1716041012

RIWAYAT HIDUP



Penulis, dilahirkan di Labuhan Ratu pada tanggal 13 Juni 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Ayah Imam Mahmud dengan Ibu Eka Nurbaiti. Penulis bertempat tinggal di Dusun II, RT 001 RW 002 Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Amin Rajabasa Lama (2004-2005), Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Labuhan Ratu (2005-2007) sembari mengemban pendidikan di SD penulis juga menempuh pendidikan di Gontor 8 Labuhan Ratu VI, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu (2011-2014), dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Way Jepara (2014-2017). Selain itu Penulis juga mengikuti cabang olahraga atletik pada masa SMA dan menjadi juara bertahan 3 kali lomba maraton 10 km dan pernah menjuarai kejuaraan lari 4000 m tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2017. Selanjutnya pada akhir tahun 2017, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis juga turut aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan di Kampus salah satunya menjadi Anggota UKM sepakbola Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di awal tahun 2020 di Desa Aji Murni Jaya Tulang Bawang, kurang lebih selama 40 hari. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di pertengahan tahun 2020 di PT. Bukit Asam Kalianda, Lampung Selatan. Perjalanan Panjang di masa perkuliahan ini penulis lewati dengan hati yang berharap Allah akan meridhoi.

MOTTO

*“Menjadi manusia yang selalu bisa menempatkan sesuatu
pada tempatnya”
(Bayu Cindi Katon)*

*“Jangan Menjadi Sampah-Sampah Perjuangan”
(KH. Hasan Abdullah Sahal)*

*Berani Hidup Tak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup,
Takut Hidup Mati Saja
(K.H Ahmad Sahal)*

*Orang Yang Belum Pernah Merasakan Kemajuan Tak
Tahu Hakikat Kemunduran
(K.H Zainuddin Fananie)*

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik ALLAH SWT

Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas karunia Mu kepadaku

Kupersembahkan Karya Kecil ini untuk

**Bapakku Tercinta Imam Mahmud
Ibuku Tercinta Eka Nur Baiti**

Selalu menjadi sumber inspirasi di dalam kehidupanku. Selalu mendoakanku dan mendukung segala aktivitas ku hingga sekarang. Semua curahan kasih sayang yang kalian berikan tidak akan mampu aku gantikan dengan apapun.

Seluruh keluarga besarku, Sahabat, Teman-temanku yang selalu mendukungku

Terimakasih atas dukungannya

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ **Identifikasi Starting Condition dalam Praktik Collaborative Governance Mengatasi Mitigasi Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing utama. Terimakasih atas arahan, saran, masukan, waktu, kesabaran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas kritik, saran, arahan, waktu serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati, S. IP., M. Si. yang telah berkenan menjadi dosen pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, arahan, waktu serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.SI. selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.

6. Bapak dan ibuku yang berdoa siang dan malam dan membiayai kuliahku dengan penuh pengorbanan.
7. Pihak Balai Taman Nasional Way Kambas yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Desa Labuhan Ratu VI yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Mitra Taman Nasional Way Kambas yaitu *Wildlife Conservation Society* (WCS) yang telah memberikan izin melakukan penelitian meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku. Bapak, Ibu, Adik, Kakek dan Nenek yang tak pernah lelah memberikan doa, semangat, motivasi dan selalu bekerja keras untuk membiayai anak-anaknya agar menjadi lebih baik. Terimakasih Bapak dan Ibu yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasi dalam hidupku dan selalu mengingatkan untuk selalu dekat dengan Allah SWT dengan rajin shalat, mengaji dan berdoa. Doakan selalu anakmu, insyaallah akan sukses dan dapat membanggakan keluarga.
11. Terimakasih pada Aisah Sabina (ASAB) Vira, Rika, Aul, Rizki, Bella, Masyi partner terbaik, sahabat, teman, keluarga, saudara atas kerjasama ketika susah senang, bantuan, dukungan, doa, motivasi dan semangat selama penelitian hingga akhir skripsi.
12. Trimakasih teman-teman *Wildlife Conservation Society* (WCS) Feby, Edo, Budi, Edy yang selalu membantu dalam mengumpulkan data hingga susah senang bersama ketika masuk hutan.
13. Terimakasih pada teman-teman seperbimbingan Ibu Rahayu dan Ibu Meiliyana yang sudah bersedia aku repotkan dalam skripsi ini, aku yang selalu banyak tanya dan banyak mengganggu waktu kalian, sudah bikin

pusing sama pertanyaan-pertanyaanku, yang selalu memberikan waktu serta bantuan kepada Penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.

14. Teman-teman *Succes People* Heri, Ginan, Arif, Yusrizal, Evie, Erlina, Tiur dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terlebih kepada Heri yang selalu memberi saya tumpangan kasur karna saya tidak punya kostan.
15. Trimakasih teman seperjuangan Viuly Amara Putri yang menjadi penolong sejak dibangku perkuliahan yang selalu menjadi kelompok dan selalu membantuku dalam mengerjakan tugas. Terlebih yang sudah sangat membantu skripsi peneliti sejak seminar proposal sampai pada tahap ini.
16. Teman-teman INGAT DOSA bang Diki, Kak Nata, Kak Amrul, Dito yang selalu menghambat dalam pengerjaan skripsi saya I LOVE YOU GAIS
17. Untuk bapak-bapak, pakde-pakde, mba-mba diluar sana yang menanyakan kapan kelar skripsi
18. Semua ANGKASA

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Febuari 2022



Bayu Cindi Katon

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Tinjauan Tentang Governance	14
2.3. Tinjauan Tentang Collaborative Governance.....	17
2.4. Tinjauan Tentang Mitigasi Konflik	32
2.5. Tinjauan Tentang Satwa Liar	34
2.6. Kerangka Pemikiran.....	35

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Instrumen Penelitian.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Teknik Analisis Data	45
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	46

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2. Kawasan Taman Nasional Way Kambas	52
4.3. Topografi dan Tipe Ekosistem Taman Nasional Way Kambas	58
4.4. Hidrologi Taman Nasional Way Kambas	60
4.5. Demografi Taman Nasional Way Kambas	63
4.6. Flora dan Fauna Taman Nasional Way Kambas Flora.....	64
4.7. Mitra-Mitra Taman Nasional Way Kambas	65
4.8. Sejarah Konflik dan Kondisi Masyarakat dan Satwa Liar di Taman Nasional Way Kambas	68
4.9. Hasil Penelitian	72
4.10. Pembahasan.....	95

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	113
5.2. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------

LAMPIRAN	122
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Lembaga Mitra TNWK.....	5
2. Penelitian Terdahulu.	10
3. Daftar Informan Penelitian.....	42
4. Dokumen-Dokumen Pendukung Penelitian.....	43
5. Matrix Identifikasi Starting Condition dalam Praktik Collaborative Governance Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Way Kambas	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Governance	16
2. Model Collaborative Governance Ansell and Gash adaptasi Sari Meika Permata	25
3. Kerangka Pikir	37
4. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Way Kambas	50
5. Kantor SPTN Way Kanan Taman Nasional Way Kambas	52
6. Wilayah SPTN Way Kanan Taman Nasional Way Kambas	54
7. Wilayah Hutan SPTN II Bungur Taman Nasional Way Kambas	56
8. Topografi Taman Nasional Way Kambas	59
9. Ekosistem Hutan Taman Nasional Way Kambas	60
10. Hidrologi Taman Nasional Way Kambas	61
11. Peta Kerja Taman Nasional Way Kambas	62
12. Mitra-mitra yang Berpartisipasi dalam Kolaborasi Mitigasi Konflik	74
13. Sumber Daya Manusia dan Non Manusia Balai Taman Nasional Way Kambas	77
14. Gambar Partisipasi Mitra dan Masyarakat dalam Kolaborasi	80
15. Beberapa Bagian Dari Luas Hutan Taman Nasional Way Kambas	89
16. Sekelompok Satwa Liar yang Memasuki Kawasan Masyarakat	90

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan negara. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Lampung adalah Taman Nasional Way Kambas (TNWK). TNWK merupakan salah satu dari dua taman nasional yang berada di Provinsi Lampung yang terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur (Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, 2018).

Bagi masyarakat umum, TNWK dikenal sejak lama sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Lampung. Namun disisi lain, Taman TNWK ini terisolasi dari kawasan hutan lainnya karena berbatasan langsung dengan 37 desa penyangga di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Dengan keberadaan TNWK yang berbatasan langsung dengan desa penyangga dapat memberikan sisi positif dan negatif tersendiri bagi kedua belah pihak. Hal ini dikatakan Bapak Ade Candra sebagai Polhut di Balai Taman Nasional Way Kambas dalam wawancara pra riset tanggal 15 Januari 2021 sisi negatif dari kawasan TNWK yang berbatasan langsung dengan desa penyangga adalah adanya konflik antara satwa liar dengan masyarakat, konflik tersebut terjadi setidaknya 20 kali dalam satu bulan. Adapun sisi positifnya adalah keberadaan TNWK dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Konflik antara satwa liar dengan masyarakat mulai terjadi sejak TNWK disahkan menjadi kawasan hutan dan daerah sekitarnya

dibuka menjadi pemukiman dan lahan pertanian bagi transmigran. Masyarakat dan gajah sumatra sering memasuki kawasan di luar wilayah teritorinya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Sukatmoko dalam dokumen Balai TNWK (2018) mengatakan bahwa TNWK menjadi semakin padat sejak Gajah dari Lampung Selatan dan Gunung Madu di “translokasi” ke TNWK pada tahun 1980. Populasi yang semakin padat tentunya mengakibatkan semakin sempitnya daerah jelajahnya untuk mencari makan.

Faktor penyebab terjadinya konflik antara satwa liar dengan masyarakat adalah kerusakan habitat akibat perambahan hutan dan tingkat kesukaan satwa liar terhadap jenis tanaman. Aspek lain penyebab terjadinya konflik satwa liar dengan masyarakat adalah peningkatan populasi manusia yang secara langsung menyebabkan konflik manusia dengan satwa liar di suatu wilayah hal ini seperti yang dikatakan Kuswanda (2014) bahwa konflik satwa liar dengan masyarakat akan berdampak langsung terhadap satwa liar dan masyarakat itu sendiri. Dampak langsung bagi manusia berupa kerugian tanaman yang dirusak satwa liar, perampasan hasil tanaman, rusaknya infrastruktur, sumber air, korban luka dan meninggal. Sementara bagi satwa liar dapat terluka dan/atau mati oleh manusia.

Konflik satwa liar dengan masyarakat pada dasarnya tidak dapat terselesaikan. Hal ini dikarenakan pola pikir dari satwa liar tidak bisa dikendalikan oleh manusia, sehingga manusia menganggap keberadaan satwa liar merugikan dan cenderung memusuhinya (Abdullah et al. 2017). Konflik manusia dan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Menurut evaluasi Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) konflik antara manusia dengan satwa liar cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan aktivitas manusia yang sering kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian

untuk kepentingan ekonomi. Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan taraf kehidupan manusia telah menyebabkan populasi satwa liar yang semula berada di habitatnya menjadi terancam. Habitat yang tersisa ini biasanya berupa hutan dengan luasan yang relatif kecil dengan kondisi pakan yang tidak mendukung. Semakin tinggi aktifitas manusia di sekitar kawasan hutan maka semakin meningkatnya laju kerusakan hutan yang menyebabkan habitat satwa liar menjadi sempit dan memaksa satwa liar untuk mencari ruang gerak baru sehingga sampai kepemukiman penduduk dan mengakibatkan konflik antara masyarakat dan satwa liar (Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, 2018).

Dengan adanya konflik manusia dengan satwa liar yang belum terselesaikan dibutuhkan upaya penanganan konflik yang terjadi. Percepatan dalam upaya penanganan konflik mitigasi konflik satwa liar dengan manusia diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat dan mitra-mitra lainnya. Keterlibatan antara pihak-pihak tersebut dapat dilaksanakan melalui praktik *collaborative governance*. *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar organisasi ini terlihat setelah tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. Aktifitas ini dilakukan guna mengurangi konflik manusia dengan satwa liar dan tetap berlandaskan pada visi Taman Nasional Way Kambas yaitu “Mewujudkan Kawasan Taman Nasional Way Kambas Sebagai Habitat Ideal bagi Satwa Liar Sumatera yang Dilindungi” dan misinya yaitu “1) Melindungi kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) secara keseluruhan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, 2) Mengawetkan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), 3) Menggali dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terutama untuk pemanfaatan wisata alam, 4) Mendayagunakan secara optimal potensi ekonomi kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) pada zona pemanfaatan dan zona lainnya di luar zona inti untuk memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan., 5) Mensinergikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri (Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, 2018).

Untuk mengatasi mitigasi konflik ini, upaya Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) didukung oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Mitra LSM yang telah melakukan kegiatan rutin patroli pengamanan kawasan dan penegakan hukum. Mitra LSM yang aktif melakukan kegiatan ini yaitu Yayasan Badak Indonesia (YABI), dengan program Rhino Protection Unit (RPU), dan *Intelligence and Law Enforcement Unit* (ILEU), WCS-IP dengan program *Wildlife Response Unit*, Program Konservasi Harimau Sumatera PKHS, dan Alert. Masyarakat mitra polhut dan mitra LSM tersebut merupakan organisasi yang berada dibawah naungan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Aktifitas antara pihak di atas merupakan bentuk *collaborative governance* dalam mengatasi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat dengan tujuan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsesus melalui interaksi formal maupun informal dalam pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Berikut adalah tabel lembaga yang bekerja sama dengan TNWK :

Tabel 1 Lembaga Mitra TNWK

Nama Lembaga	Jenis Kegiatan	Pola Kerjasama	Periode
I	II	III	IV
Komunitas Untuk Hutan Sumatra (KHS)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat untuk anggota Tim - Masyarakat sebagai penyuplai pakan gajah - Misi utamanya tentu untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat desa penyangaa 	KHS dengan masyarakat	2015
Taman Nasional Way Kambas (TNWK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kader konservasi - Sosialisasi LH dan Konservasi - Perlibatan HKN 	TNWK dengan Masyarakat	1978
Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitan Bibit Kayu 	Dinas Kehutanan dengan Masyarakat	2016
<i>Wildlife Conservation Society</i> (WCS)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Konflik - Fasilitas Kegiatan - Pembangunan Gardu Jaga - Alat Mitigasi - WCS memulai kegiatan penanganan konflik antara gajah dan manusia Human elephant conflict sejak tahun 2002 	Pendampingan Kelompok	2002

Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALERT)	- - -	Pendampingan Wisata Restorasi di Luar Kawasan Alat Mitigasi	Pendampingan Kelompok	2015
Yayasan Badak Indonesia (YABI)	- - - -	Pendampingan Wisata Restorasi di Luar Kawasan Alat Mitigasi Sosioalisasi LH dan Konservasi	Pendampingan kelompok	Sekarang
<i>Rhino Protection Unit</i> (RPU)	- - - -	Pendampingan Konflik Fasilitas Kegiatan Pembangunan Gardu Jaga Alat Mitigasi	Pendampingan kelompok	1996

Sumber : Rencana Kolaboratif TNWK, 2018

Selain itu Balai TNWK juga membentuk unit pengamanan swakarsa yang bernama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang awalnya diinisiasi untuk pengamanan konflik gajah-manusia. MMP berasal dari 22 desa dengan jumlah sekitar 220 orang, yang mendapat tunjangan kerja sebesar Rp 250,000 per bulan. Anggaran untuk MMP ini berasal dari APBN. Balai TNWK dan *Veterinary Society for Sumatran Wildlife Community (Vesswic)* berinisiatif memberdayakan Gajah dari Taman Nasional Way Kambas yang telah dijinakkan (*captive*) dan mahout (pawang gajah) yang dimulai pada 2008. Pada akhir 2010, Camp ERU pertama di Bungur berdiri, disusul Camp ERU di Tegal Yoso (2013), di Margahayu (2014), dan terbaru di Braja Harjosari (2018). LSM Komunitas untuk Hutan Sumatra (KHS) mulai bergabung mendukung ERU pada 2016. Dengan berkembangnya ERU menjadi 4 lokasi, maka aspek kelembagaannya harus mulai dibenahi. Hal ini terkait dengan adanya jumlah gajah yang didayagunakan di Camp ERU, mahout, dan staf terkait lainnya. Cara kerja ERU bersifat partisipatif dengan masyarakat umum dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Gajah yang berjumlah masing-masing 10 orang di 22 desa penyangga. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari arus informasi pergerakan gajah dan

penggiringan bersama. Secara umum fungsi ERU yaitu untuk patroli untuk pemantauan, dan penggiringan gajah liar, dan penjagaan untuk mencegah gajah liar ke luar kawasan (Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK, 2018).

Peran *collaborative governance* dalam penyelesaian sebuah konflik antara satwa liar dengan manusia memiliki alasan yaitu sebagai sumber hukum dan pemecahan masalah disuatu tempat tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh Ansel and Gash dalam Sari (2019) bahwa ketika berbagai upaya telah dilakukan dan belum membuahkan hasil maka kolaborasi bisa dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut yang memiliki legitimasi kuat karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Proses *collaborative governance* akan berjalan dengan baik apabila indikator yang ada pada proses *collaborative governance* dilaksanakan dengan baik pula, adapun variabel utama dalam proses *collaborative governance* adalah kondisi awal (*starting condition*). Hal ini mengartikan bahwa identifikasi *starting condition* berperan penting dalam praktik *collaborative governance* untuk mencapai suatu tujuan tertentu, karena dalam variabel *starting condition* terdapat penyesuaian visi dan misi antara pihak terkait yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses kolaboratif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan banyaknya proses kolaborasi yang gagal akibat adanya perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Identifikasi *Starting Condition* Dalam Praktik *Collaborative Governance* Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi penelitian dalam kajian ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai *starting condition* dalam praktik *Collaborative Governance*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

terutama organisasi yang bekerja sama dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas tentang *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Peneliti akan mengangkat tema tentang Identifikasi *Starting Condition* Dalam Praktik *Collaborative Governance* Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional WayKambas Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan latar belakang masalah dan kajian teori yang sama dengan penelitian penulis dan melalui penelitian terdahulu, penulis mampu mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu.

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
	I	II	III
Nama	Meika Permata Sari	Novita Tresianadan Noverman Duadji	Izzul Fatchu Reza
	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
	I	II	III

.Judul	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Objek Wisata <i>Horti Park</i> Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan CollaboratiMa nagementOf The TelukKiluan Tourism	<i>(Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Buru Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tujuan	Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengidentifikasi pengembangan objek wisata <i>Horti Park</i> Lampung di Desa Sabah Balau Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dapat dikategorikan sebagai praktik <i>Collaborative governance</i>	Untuk menjelaskan apakah prasyarat dimiliki dan dibutuhkan untuk terciptanya proses kolaboratif pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan telah ada sehingga proses Kolaboratif tidak menghasilkan <i>pseudo</i> demokrasi	- Untuk mendeskripsikan keberlangsungan <i>collaborative governance</i> belum memberikan hasil optimal antara actor terkait dalam pengelolaan buruh migran di DIY - Untuk mengetahui factor penghambat <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan di DIY
Fokus Penelitian	Dapat mengidentifikasi apakah pengembangan wisata <i>Horti Park</i> masuk kedalam praktik <i>Collaborative governance</i>	Prasyarat terciptanya proses kolaborasi: 1. Terdapat partisipasi pemangku kepentingan. 2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan 3. Terdapat aktor yang kompeten	Fokus penelitian 1. Indikator menilai dinamika : pengaturan institusional & prosedur, kepemimpinan, pengetahuan sumber daya 2. factor penghambat <i>collaborative governance</i> pengelolaan TKI DIY

Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pengembangan objek wisata <i>Horti Park</i> Lampung dikategorikan sebagai praktik <i>collaborative governance</i> mengacu pada model <i>collaborative governance</i> Ansel & Gash	Implementasi model berbasis masyarakat di dasari oleh banyak keuntungan yang diperoleh bukan saja ekonomi, tetapi jauh lebih pentingnya adalah keberlanjutan dari wisata Kiluan serta kelestarian di sekitar lingkungan pariwisata	Kapasitas <i>Collaborative governance</i> pengelolaan TKI masih kurangnya kejelasan terhadap prosedur pengelolaan TK dan penyamaan visi misi masih belum terlaksana dengan baik.
------------------	--	--	--

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki judul “Identifikasi *Starting Condition* Dalam Praktik *Collaborative Governance* Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur”. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur.

Indikator yang digunakan dalam penelitian *collaborative governance* ini adalah kondisi awal (*starting condition*) dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di Taman

Nasional Way Kambas. Kondisi awal pada kolaborasi berupa kesamaan visi dalam kepentingan yang ingin dicapai bersama melalui kolaborasi/saling bekerja sama. Masalah yang dialami dari kondisi awal yaitu :

a. Ketidak seimbangan sumber daya

Masalah *stakeholder* sering terjadi pada *collaborative governance* adalah ketidakseimbangan sumber daya. *Collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat jika pemerintah dan organisasi yang terkait tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dengan baik.

b. Insentif (keuntungan) untuk berpartisipasi

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat melainkan sebagai subjek pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya sifat dari sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan insentif (keuntungan) yang diperoleh oleh stakeholder yang terlibat dalam *collaborative governance* dan mereka harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan

c. Adanya ketakutan akan terjadinya konflik

Menurut Andranovic dalam Ansel and Gash mengatakan bahwa terjadinya konflik dalam kerja sama antar para pemangku kepentingan akan menghambat proses kolaborasi. Namun ketika para pemangku kepentingan saling ketergantungan, tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar untuk *collaborative governance*. Oleh karena itu konflik yang tinggi tidak

selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa stakeholder melihat mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa terlihat dalam proses kolaborasi walaupun ada kepentingan dari stakeholder lain yang bertentangan.

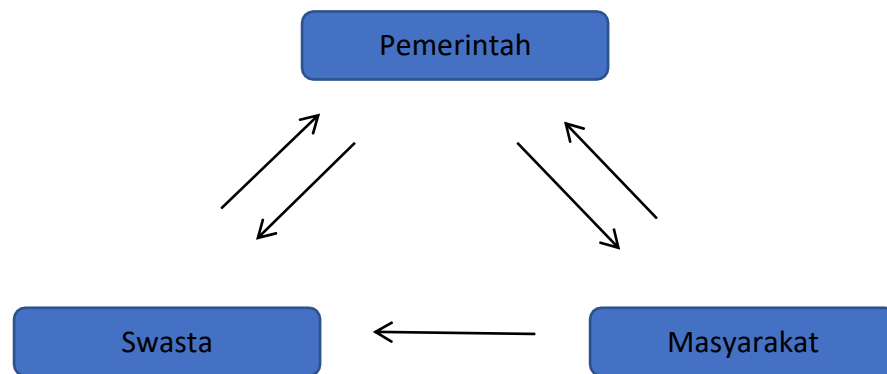
2.2. Tinjauan Tentang Governance

Definisi *governance* penting dijelaskan terlebih dahulu karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *collaborative governance*. Hal ini diharapkan dapat membantu pemaknaan yang lebih konkrit dan tidak terjadi salah pemaknaan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam kajian keilmuan Pemerintahan terdapat istilah *government* dan *governance*, makna dari kedua istilah tersebut hampir serupa namun memiliki makna yang berbeda (Meika, 2019).

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non- pemerintah (Dwiyanto, 2015).

Governance adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Kurniawan, (2007). Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Konsep dari paradigma ini adalah bagaimana pemerintah, swasta, dan publik bekerja sama dalam menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan pemahaman di atas jadi perbedaan Government dan Governance adalah Government berpendapat bahwa pemerintah merupakan aspek utama dalam mengatur, memberikan pelayanan, serta menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Governance menitik beratkan kepada kerjasama antara pemerintah, swasta, dan publik. Bergesarnya paradigma dari government ke arah governance, menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik disebut dengan pemerintahan yang baik (Santoso, 2008).

Dalam menerapkan governance yang baik, diperlukan kajian literatur yang memiliki pendekatan berbeda-beda, kemudian disesuaikan dengan keadaan dan waktu yang tepat. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat-sarat aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (Hard Law) dan pendekatan yang lebih menekankan pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (Soft Law) (Daniri dalam Sari, 2019).



Gambar 1 Governance

Sumber : Abidin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, 2013.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Rosidi & Fajriani, 2013).

Menindak lanjuti 3 domain dari institusi *governance* yang meliputi *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing hal ini seperti yang dikatakan Sedarmayanti (2003). Sementara Ulum dan Ngindana (2017) mendefinisikan bahwa *governance* mengindikasikan „diseminasi otoritas“ dari *single actor* menjadi multi-aktor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam konsep *governance*, memiliki dasar *collaborative* dalam penyelenggaraan dan pencapaian

suatu tujuan bersama melalui pemerintah itu sendiri, masyarakat dan swasta. *Governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan urusan publik.

Berdasarkan pengertian di atas menurut peneliti, *governance* adalah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah. Dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri diperlukan kerjasama antar pihak terkait diantaranya yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerjasama tersebut melalui pendekatan kolaborasi dengan pihak tersebut dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2.3. Tinjauan Tentang Collaborative Governance

2.3.1 Definisi Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan upaya kolaborasi yang muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian. *Collaborative Governance* artinya memiliki dasar pemerintah tidak lagi dapat memonopoli penyelenggaraan negara, melainkan dapat bekerja sama dengan aktor swasta maupun masyarakat (Alter dan Hage dalam Islamy, 2018).

Menurut pendapat Ansell dan Gash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansell dan Gash, 2007:545). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya

akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-statedi dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Kemudian menurut Cordery, Hartman et al., dalam Mah & Hills (2012) *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

Pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009) yang menyatakan bahwa secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis berpendapat bahwa definisi *collaborative governance* sudah dalam gagasan yang sama. Akan tetapi penjelasan dari Ansell dan Gash merupakan model keselarasan serta keseimbangan kekuatan dan sumber daya antara 3 aktor ketatanegaraan yaitu swasta, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Keseimbangan ini

perlu berlandaskan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih rendah sehingga mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya dalam mengatasi masalah-masalah kompleks melalui tujuan dan implementasi yang kolaboratif.

2.3.2 Dimensi dan Proses Collaborative Governance

O'Leary, Gazley, McGuire and Bingham dalam Junadi (2015) menyebutkan mengenai tiga dimensi yang berbeda jenis sasaran organisasi yang dicari dari kolaborasi antar organisasi sebagai berikut ini: 1). Dimensi pertama, pencapaian sasaran kepentingan publik adalah tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang dapat mendorong dan meningkatkan pelayanan. 2). Kedua, hubungan antar organisasi lebih ditingkatkan agar mendapatkan dua manfaat yaitu manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika dalam aktivitas organisasi kolaboratif sama baiknya, maka akan didapatkan hasil yang memuaskan dalam konteks pelayanan atas permintaan masyarakat. Hubungan yang baik antara organisasi satu dengan lainnya akan meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. 3). Dimensi ketiga, pengembangan organisasi jika dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik bagi kelangsungan organisasi itu sendiri. Jika kolaborasi dilakukan sesuai dengan spesialisasi tugasnya masing-masing dan berusaha menjalankan kewajibannya dengan kesungguhan, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan.

Proses kolaborasi terdapat beberapa tahapan, meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan namun suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk dilakukan sebagai strategi dalam pengelolaan urusan publik. Adapun karakter dari proses

collaborative governance menurut Ansell dan Grash (2007) sebagai berikut:

1. *Face to face dialoge*

Face to face dialoge adalah bentuk *collaborative governance* yang dilakukan secara tatap muka yang melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Dialog secara langsung penting dilakukan dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama serta mengurangi bahaya atau ancaman dalam suatu program kerja.

Bentuk dialog sebagai penerapan *collaborative governance* tidak semata-mata komunikasi biasa ataupun negosiasi yang ala kadarnya. Namun dialog secara langsung dapat meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari stakeholder yang terlibat sehingga menjadikan bentuk *collaborative governance* dapat bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Trust building*

Seringkali dalam memulai suatu proses kolaborasi, cukup sulit dalam menanamkan rasa percaya antar stakeholder yang terlibat langsung. Buruknya rasa percaya antar stakeholder ini merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi.

3. *Commitment to process*

Hubungan antara komitmen dengan *collaborative governance* tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah komponen yang saling melengkapi dalam usaha mencapai tujuan bersama. Komitmen merupakan motivasi untuk melakukan keterlibatan stakeholder ke dalam aktivitas *collaborative governance*. Dalam implementasinya cukup sulit dalam melakukan komitmen, namun komitmen perlu dilakukan oleh setiap stakeholder guna mencegah resiko yang tidak diinginkan dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan bentuk tanggung jawab dari stakeholder dalam melakukan relasi yang dilakukan sebagai hal baru dan tanggung jawab tersebut perlu terus dikembangkan sesuai dengan keadaan saat ini.

4. *Share Understanding*

Pada proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang mereka lakukan dan mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Hal ini dapat digambarkan sebagai pemahaman yang dilakukan bersama guna mencapai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama dan ideologi bersama. Saling berbagi juga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder yang berkaitan. Hal ini merupakan bentuk *collaborative governance* agar setiap elemen tidak bekerja secara independen.

5. *Intermediate outcomes*

Bentuk pencapaian dari proses kolaborasi adalah bentuk keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil dari proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan kesempatan

yang dapat memberikan keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

2.3.3 Tujuan dan Alasan Melaksanakan Collaborative Governance

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Junaidi dalam Septian Cahyono (2020). Menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007).

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi. *Collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini

dilakukan sebagai berikut ini: 1). kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, 2.) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan 3). upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. 4). Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. 5). Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. 6). Mobilisasi kelompok kepentingan. 7). Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Berdasarkan pendapat diatas kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Adanyakeberagamaman kepentingan antar tiap kelompok memicu munculnya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implemenntasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga saja karena keterbatasan lembaga tersebut.

Alasan organisasi melakukan *collaborative governance* yaitu: 1). Perubahan sosial, saat ini merupakan era reformasi masyarakat dan fase informasi mengakibatkan struktur dapat menyebar di seluruh lingkup, 2). Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini tidak akan dapat dikelola secara efisien jika hanya mengandalkan satu organisasi. Pemerintah membutuhkan mekanisme berbeda dan bersifat fleksibel. Kolaborasi antara berbagai sektor dibentuk mengatasi masalah (McGuire dalam Sabaruddin, 2015:34).

Dasar pemikiran menggunakan *collaborative governance* yaitu sebagaiberikut: 1). Melaksanakan kepentingan pribadi Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. 2). Mendapatkan sumber daya Organisasi yang ada dalam lingkungan dengan sumber

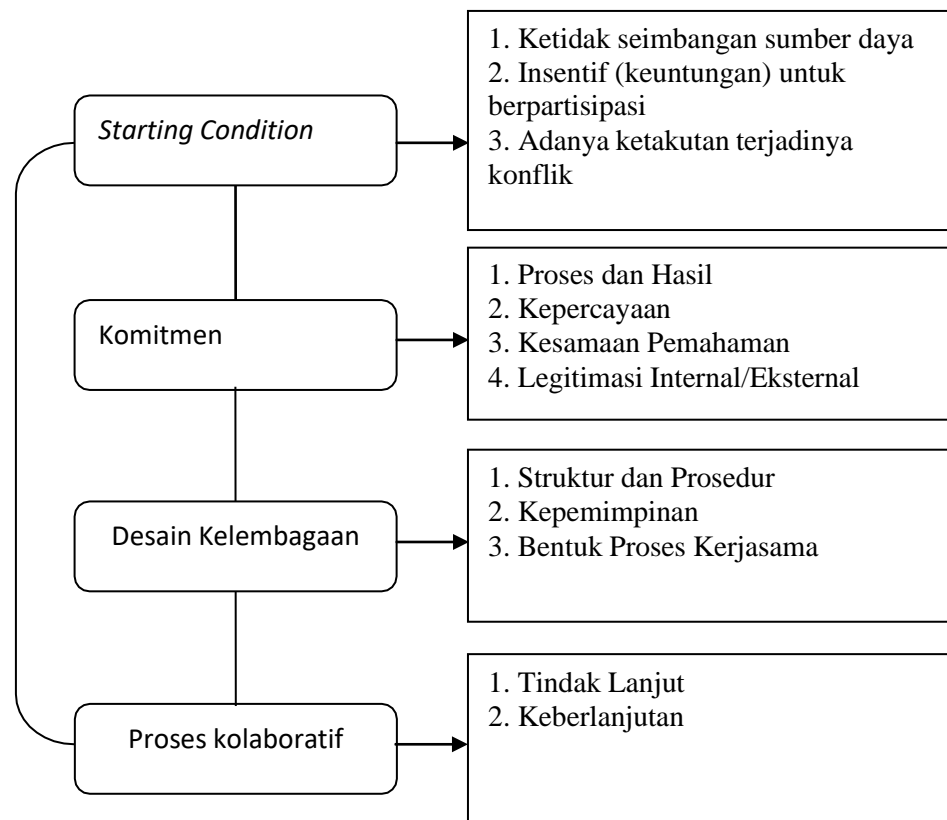
daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan dalam mencapai kepentingan organisasi. 3). Menjawab tekanan politik Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama. 4). Reaksi atas kekuatan institusional Peserta pelaksanaan proses kolaboratif sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis. 5). Mengurangi biaya transaksi Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategis. 6). Mempromosikan nilai-nilai demokrasi Meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil membangun jaringan organisasi dan sosial (Imperial dalam Sabaruddin, 2015).

Berdasarkan pembahasan di atas para ahli meyakini dalam melaksanakan aktifitas *collaborative governance* merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam mempercepat upaya demokrasi dalam mencapai suatu tujuan bersama. *collaborative governance* dilakukan guna menyatukan pendapat dari kepentingan publik sehingga terciptalah kebijakan sesuai dengan kepentingan bersama yang berasaskan undang-undang yang berlaku.

2.3.4 Model Collaborative Governance adaptasi Sari Meika Permata

Terdapat beberapa model *collaborative governance* yang akan disajikan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Model *collaborative governance* Ansell and Gash



Gambar 2 Model Collaborative Governance Ansell and Gash adaptasi Sari Meika Permata

Sumber : Ansell dan Gash dalam Sari, 2018

Dari gambar di atas model *collaborative governance* terdiri dari 4 variabel utama yaitu :

1. *Starting Condition* / Kondisi awal

Starting Condition / Kondisi awal pada kolaborasi berupa kesamaan visi dalam kepentingan yang ingin dicapai bersama melalui kolaborasi/saling bekerja sama. Dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh stakeholder dimana munculnya isu *local emotional* yang mempengaruhi munculnya anggapan saling bermusuhan. Berdasarkan permasalahan di atas maka Ansell

and Gash (2008) merangkum permasalahan tersebut menjadi 3 variabel yaitu :

a. Ketidak seimbangan sumber daya

Masalah ketidak seimbangan sumber daya adalah masalah bagi keberlangsungan *collaborative governance*. Jika beberapa stakeholder tidak memiliki organisasi, status dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi, atau dengan keterbatasan yang dimilikinya mengharapkan suatu perlakuan yang seimbang dan setara dengan para pemangku kepentingan lainnya, maka *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi dari para aktor yang lebih kuat. Ansel and Gash (2008) juga menambahkan bahwa ketidak seimbangan sumber daya dapat menjadi masalah jika stakeholder utama tidak memiliki infrastruktur organisasi yang representatif dalam kolaborasi.

Ketidakseimbangan sumber daya sebenarnya sangat mengganggu proses kolaborasi, sehingga dibutuhkan tingkat pemahaman lebih untuk bisa memberdayakan para stakeholder secara maksimal. Tujuan dari variabel ini sebenarnya adalah untuk saling mengisi segala kekurangan yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi. Bukan malah memanfaatkan kekurangan anggota lain untuk mengambil keuntungan sendiri. Oleh karena itu keterlibatan semua unsur sangat dibutuhkan untuk mengisi segala keterbatasan yang dimiliki. Ketidakseimbangan sumber daya terjadi karena tidak bersatunya para pemangku kepentingan, dan merasa selalu berada lebih dibandingkan yang lain.

b. Insentif untuk berpartisipasi

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat melainkan sebagai subjek pembangunan. Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya sifat dari sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan insentif (keuntungan) yang diperoleh oleh stakeholder yang terlibat dalam *collaborative governance* dan mereka harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan.

c. Adanya ketakutan akan terjadinya konflik

Menurut Ansel and Gash (2008) secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
2. Konflik antar kelompok kepentingan yang sulit diredam
3. Upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik.

Menurut Andranovic dalam Ansel and Gash (2008)

mengatakan bahwa terjadinya konflik dalam kerja sama antar para pemangku kepentingan akan menghambat proses kolaborasi. Namun ketika para pemangku kepentingan saling ketergantungan, tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar untuk *collaborative governance*. Oleh karena itu konflik yang tinggi tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa stakeholder melihat mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa terlihat dalam proses kolaborasi walaupun ada kepentingan dari stakeholder lain yang bertentangan.

2. Desain kelembagaan

Pemimpin menginstruksikan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam musyawarah guna menyepakati dan mencapai tujuan bersama. Dalam *desain* kelembagaan penggunaan tenggang waktu menjadi masalah bagi *collaborative governance* karena secara tidak langsung mengurangi insentif kerjasama jangka panjang.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan pihak pemangku kepentingan dan memobilisasi untuk kesuksesan kolaborasi. Pemimpin yang tidak memiliki spesialis kerja akan menghambat implementasi kemungkinan kerjasama yang efektif.

4. Proses kolaboratif

Proses kolaboratif terdiri dari 3 langkah yaitu :

- a. Masalah pengaturan
- b. Arah pengaturan
- c. Pelaksanaan

Model kolaborasi penting menarik perhatian sebagai konteks perubahan. Kolaborasi tergantung pencapaian siklus positif antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman. Langkah awal kolaborasi dimulai dengan beberapa langkah yaitu:

a. *Face to face*

Face to face adalah sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama. *Collaborative governance* didasarkan pada *face to face* antara pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan fokus pada keramah-tamaan. Dialog secara langsung diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama.

b. Membangun kepercayaan

Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi tentang membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan merupakan fase terpisah dari dialog dan negosiasi hal yang substantif.

c. Proses dalam mencapai komitmen

Komitmen terkait motivasi berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Pemangku kepentingan ingin berpartisipasi untuk mengamankan legitimasi dalam memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan tawar-menawar itikad baik untuk saling menguntungkan cara terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan kesediaan untuk melaksanakan musyawarah.

d. Pemahaman atas keputusan bersama

Pemahaman atas keputusan bersama menyiratkan persetujuan definisi masalah berarti persetujuan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk

mengatasimasalah. Pengembangan pemahaman atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses kolaboratif dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi.

e. Hasil sementara

Hasil sementara merupakan hasil dari beberapa jenis pencarian fakta. Kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keunggulan kolaborasi relatif konkret. Keuntungan dari hasil kolaborasi bukan sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan dalam keberhasilan kolaborasi.

a. Model *collaborative governance* Prefontaine Lise

Model *collaborative governance* dibagi atas dua jenis yaitu:

a. Model *public-public collaboration*

Mencakup persetujuan antara badan publik dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu horizontal dan vertikal. Pertama mengacu pada kesepakatan antara dua lembaga pada tingkat yang sama dari pemerintahan. Kedua mengacu pada aliansi antar pemerintah lokal, provinsi atau pemerintah nasional.

b. Model *public-private collaboration*

Bentuk kolaborasi menyajikan tingkat keragaman lebih besar. *Sub-contracting* dan *out-sourcing* merupakan dua tipe jenis kolaborasi ini. Pemerintah bertanggung jawab untuk layanan secara total atau sebagian dikelola oleh sektor swasta (Prefontaine Lise dalam Meika, 2019).

b. Model Manajemen Kolaboratif

Model Manajemen Kolaboratif Terdiri dari Beberapa Tahap :

a. *Jurisdiction-Based Management Model*

Inti dari model ini menekankan kepala daerah mengambil tindakan sifatnya strategis dengan beberapa aktor dan lembaga dari berbagai pemerintah dan sektor. Kepala daerah didorong oleh strategi bersifat rasional sebagai model berbasis yuridiksi.

b. *Abstinence Model*

Menunjukkan bahwa keinginan menjauhkan diri dari kolaborasi. Memilih untuk tidak terlibat dalam semua program pemerintah terutama sifatnya tidak mengikat. Model ini menghindari karena :

- i. Beberapa wilayah keberatan keterlibatan tingkatan pemerintah lain
- ii. Kekurangan sumber daya
- iii. Pemerintahan tidak berkolaborasi secara vertikal maupun horizontal.

c. *Top-Down Model*

Model ini merupakan keputusan dilematis birokrasi tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui tindakan pemerintah lain.

d. *Donor-Recipient Model*

Melibatkan pemberi dan penerima bantuan didasarkan keterlibatan aktor dalam sistem kolaboratif saling tergantung satu sama lain melalui kontrol sistem yang dijalankan. Manajer penerima sering mencari beberapa perubahan yang diinginkan untuk yuridiksi.

e. *Reactive Model*

Model ini menggunakan pendekatan *maybe, maybe not*. Kadang memilih untuk berpartisipasi, kadang tidak. Alasan strategi mengapa tidak mau berkolaborasi :

- i. Prinsip otonomi
- ii. Dikotomi politik-administrasi
- iii. Kegiatan ini tidak didorong misi

2.4. Tinjauan Tentang Mitigasi Konflik

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana, disebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Gerungan, 2020). Mitigasi dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu : Mitigasi struktural, berupa pembuatan infrastruktur sebagai pendorong minimalisasi dampak dan penggunaan pendekatan teknologi dan mitigasi non struktural, berupa pengelolaan tata ruang dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat (Rahman, 2015). Mitigasi merupakan upaya lanjutan dalam upaya penanggulangan bencana agar dapat diminimalisir terjadinya bencana.

Definisi konflik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah masalah yang konkrit dan terjadi kepada seluruh aspek kehidupan dimana terjadi pada manusia dengan manusia, manusia dengan alam bahkan manusia dengan hewan/satwa liar.

Konflik antara manusia dan satwa liar sering terjadi akibat beberapa interaksi negatif baik secara langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada dasarnya konflik adalah kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan semua pihak yang berkonflik. Oleh karena itu konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi (Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut/II/2008).

Adapun kerugian yang sering terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan daerah konservasi, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia namun intensitasnya masih jarang terjadi dibandingkan dengan rusaknya lahan pertanian masyarakat. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, buaya, dan lainnya. (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2019).

Latar belakang terjadinya konflik manusia dengan satwa liar adalah perbedaan ciri-ciri dan karakter yang dibawa dalam suatu interaksi. Menurut Sugiyo konflik antara manusia dengan satwa liar tidak akan terselesaikan. Tetapi kita sebagai manusia dengan kodratnya dapat bekerja sama melalui organisasi yang menaungi daerah konservasi Taman Nasional Way Kambas dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Apapun yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia dengan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Dengan begitu seharusnya pemerintah dengan pihak terkait lebih bijaksana dalam melakukan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar agar lebih optimal dan melakukan penanggulangan sesuai dengan akar permasalahan konflik yang terjadi (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut II/2008). Berdasarkan pendapat di atas, dirasakan perlu adanya mitigasi konflik manusia dengan satwa liar yang berpedoman pada kerja sama antara pihak yang menaungi daerah konservasi Taman Nasional Way Kambas.

2.5. Tinjauan Tentang Satwa Liar

Etologi merupakan disiplin ilmu yang diakui memiliki sejumlah jurnal yang mencakup seperti perilaku hewan, kesejahteraan hewan, perilaku terapan hewan, dan kognisi hewan. Satwa liar termasuk kedalam ilmu etologi, di dalam ilmu etologi satwa liar adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam maupun perbuatan manusia. Menurut Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satwa liar adalah segala jenis hewani yang hidup di darat, di air, maupun di udara. Sedangkan menurut Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 7 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, maupun di udara yang memiliki karakteristik berbeda-beda, baik yang dipelihara ataupun hidup di alam bebas. Dari kedua pengertian dari Undang – Undang di atas satwa liar merupakan hewan yang hidup di semua ekosistem alam yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda baik yang dipelihara oleh manusia ataupun yang berada di alam bebas.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun demikian Indonesia juga adalah negara yang memiliki angka tertinggi tentang satwa liar yang terancam punah. Penyebab terancam punahnya satwa liar yang ada di Indonesia adalah deforestasi. Deforestasi merupakan berkurangnya luasan kawasan hutan sebagai habitat utama satwa liar dan degradasi yaitu penurunan fungsi ekosistem hutan (Raden Garsetiasih, 2019). Artinya deforestasi dan degradasi merupakan faktor utama penyebab kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Efek dari terjadinya aktivitas ini adalah terancam punahnya satwa liar yang ada di Indonesia.

Interaksi yang negatif antara manusia dan satwa liar serta penurunan kualitas habitat satwa liar dapat mengakibatkan terjadinya konflik

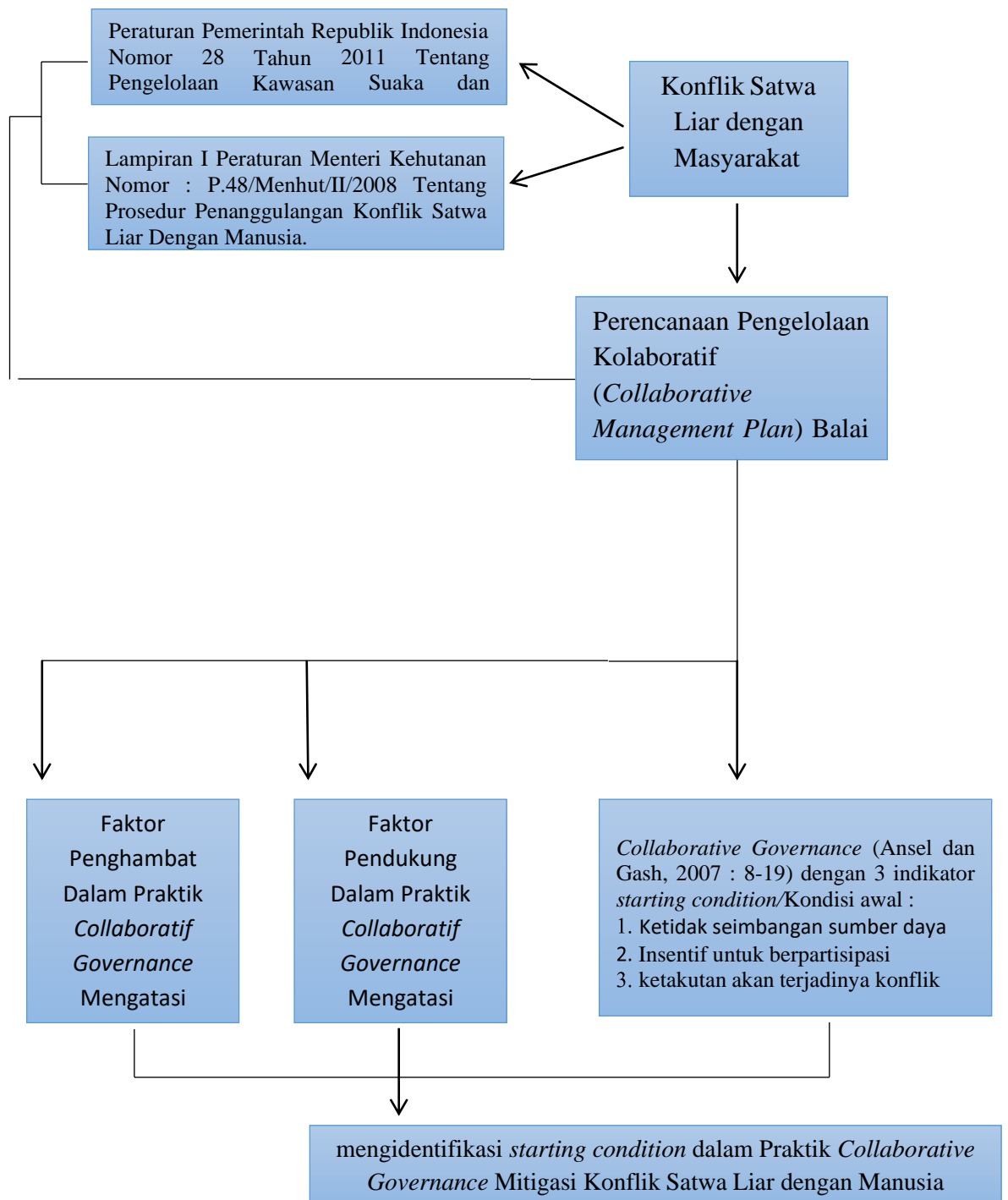
antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu akibat dari konflik tersebut adalah dapat merugikan semua pihak yang berkonflik dan cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar atau berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar itu sendiri. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya yaitu rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar.

2.6. Kerangka Pemikiran

Konflik manusia dengan satwa liar adalah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Namun demikian konflik ini dapat ditangani dengan harapan intensitas konflik manusia dengan satwa liar dapat berkurang. Pemicu adanya konflik manusia dengan satwa liar adalah topologi Taman Nasional Way Kambas yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk terutama desa-desa penyangga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah adanya aktifitas meramba hutan oleh manusia yang mengakibatkan berkurangnya habitat satwa liar dan insting dari satwa liar itu sendiri dalam mencari suplay makanan. Dengan alasan di atas maka penting dilakukan pembahasan lebih dalam penanganan konflik tersebut. Upaya percepatan penanganan konflik satwa liar ini memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan antara ketiga pihak tersebut dapat terlaksana melalui indentifikasi *starting condition* dalam praktik *Collaborative Governance*.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dua tujuan utama penelitian: pertama untuk mengetahui bagaimana indentifikasi *starting condition* dalam praktik *Collaborative Governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. Kedua, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. Teori yang digunakan yaitu model *collaborative governance*

menurut Ansel dan Gash, pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator *starting condition* serta dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menjalankan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar menggunakan praktik *collaborative governance*. Secara lebih jelas kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:8- 9).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan suatu pendekatan penelusuran untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral untuk mengetahui gejala tersebut dibutuhkan beberapa tahap hingga menghasilkan hasil akhir yakni berbentuk laporan (Raco, 2010:6-7). Sedangkan menurut Anggito, A., & Setiawan, (2018:9-10) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Hasil dari analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi dari data-data yang terkumpul. Peneliti dapat membuat interpretasi atau tafsiran untuk menangkap arti yang terdalam dan hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat memenuhi tujuan yakni mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita dimana hal tersebut

dapat dipahami bila peneliti dapat menelusurinya secara mendalam dan tidak terbatas pada pandangan di permukaan inilah yang menjadi ciri khas metode kualitatif (Raco, 2010:1-2).

Penelitian ini menggambarkan aktifitas identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governanc* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas dan mengetahui faktor- faktor penghambat dan pendukungnya melalui praktik *Collaborative Governance*. Data yang terkumpul merupakan hasil dari wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Guna untuk mendapatkan hasil yang baik maka penulis mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komperhensif.

3.2.Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian adalah batas masalah yang ada dalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan *domain* tunggal atau beberapa *domain* terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Kebaruan informasi bisa berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial (Sugiyono, 2016:209). Peneliti akan memperoleh gambaran umum secara menyeluruh dan dapat memahami secara lebih mendalam. Berikut adalah penjelasan fokus penelitian ini menurut Ansell and Gash :

1. Identifikasi *starting condition* dalam Praktik *collaborative governance* dalam mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sesuai model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash. Adapun indikator *starting condition* dalam teori Ansell and Gash adalah sebagai berikut :

- a. Ketidak seimbangan sumber daya (Sumber Daya Manusia)
Indikator ini digunakan untuk melihat ketidakseimbangan sumber dayamasyarakat yang ada di TNWK. Tujuan dari indikator ini adalah untuk saling mengisi segala kekurangan antar stakeholder yang terlibat dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik di TNWK.
 - b. Insentif (keuntungan) untuk berpartisipasi
Indikator ini dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk terlibat dalam praktik kolaborasi di TNWK baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya partisipasi masyarakat dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik ini selalu memperhitungkan insentif (keuntungan) yang diperoleh.
 - c. Adanya ketakutan akan terjadinya konflik
Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa konflik yang terjadi di internal pelaku kolaborasi tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi dan tidak menjadikan sebagai alasan TNWK dalam menjalankan praktik *collaborative governance*.
2. Faktor penghambat dan pendukung pada praktik *collaborative governance* dalam mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sesuai model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash yang meliputi :
 - a. Faktor pendukung
 - Internal dari segi Sumber Daya Manusia yang ada di Balai Taman Nasional Way Kambas.
 - Eksternal yaitu, dukungan dari mitra ataupun masyarakat terhadap aktifitas mitigasi konflik

- b. Faktor penghambat
 - Internal, kurangnya Sumber Daya Manusia jika tidak ada bantuan dari mitra Taman Nasional Way Kambas untuk melakukan mitigasi konflik.
 - Eksternal, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan mitigasi konflik.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, pengalaman personal, hasil wawancara, observasi lapangan, dan hasil pengamatan visual. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku dan materi tertulis yang relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan penelitian.

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara kepada narasumber, informan pada partisipan, yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 3 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Kuswandono, S.Hut., M.P	Kepala Balai TNWK
2.	Sukarman, SP	Koordinator Polisi Kehutanan
3.	Sugiyo	Manajer <i>WildLife Conservation Society</i>
4.	Sukatmoko	Koordinator Data dan Evaluasi Pelaporan Kehumasan
5.	Feby Fahrul Pratama	Asisten Smart Patroli
6.	Andrean Saputra	Asisten Smart Patroli
7.	Budi Apriyanto	Asisten Smart Patroli
8.	Ahmad Rifki Renaldo	Asisten Smart Patroli

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa datapendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan objek/ lokasi penelitian.

Tabel 4 Dokumen-Dokumen Pendukung Penelitian

No	Nama Dokumen
1.	Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung Tahun 2018-2023
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011
3.	Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa liar.

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai jenis metode. Maka kompetensi peneliti tentang topik yang akan diteliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Adapun hal yang akan dilakukan peneliti atau yang akan menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian ini juga merupakan ciri khas penelitian kualitatif dimana tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan membutuhkan peran aktif dari peneliti selain itu peneliti juga akan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang bersifat terbuka, pedoman dokumenter, pedoman observasi dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, ballpoint, pensil, dan lain- lain).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan data langsung ke Balai Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung Timur untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan panduan wawancara yang setiap responden diberi pertanyaan yang sama dengan panduan wawancara tersebut menggunakan bahasa yang tidak formal. Informan yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan manusia yaitu Balai Taman Nasional Way Kambas, Mitra- mitranya serta masyarakat sekitar yang ikut dalam berkolaborasi.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti melakukan observasi mitigasi konflik satwa liar dengan manusia di sekitar Taman Nasional Way Kambas dengan cara mengamati secara langsung dan melihat pengaplikasiannya serta perilaku dari *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam kegiatan

collaborative governance mitigasi konflik di Taman Nasional Way Kambas. Dokumen berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk arsip-arsip yang dimiliki Balai Taman Nasional Way Kambas maupun Mitra-mitranya.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dan kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis data :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2016: 247). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian melalui wawancara terhadap key informan (informan kunci) yang berpotensi terhadap masalah yang diteliti dan juga mengumpulkan dokumentasi

yang diperoleh langsung dari lapangan untuk melengkapi informasi atau sebagai data pendukung sesuai dengan yang diharapkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan Analisis data kualitatif selanjutnya yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016).

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh, Keabsahan data harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkandengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada empat macam triangulasi yaitu: 1) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, 2) triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama, 3) triangulasi penyidik dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain, 4) triangulasi teori dilakukan secara induktif atau

secara logika.

b. Kredibilitas

Memperpanjang cara observasi agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pengamatan terus menerus agar peneliti dapat melihat sesuatu secara cermat, terinci dan mendalam sehingga hasil akhir yang didapatkan dapat menjadi hasil yang dapat dipercaya.

c. Auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas)

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Tujuannya adalah untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dan diskusi sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji pemikiran peneliti. Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti sehingga bersama mereka peneliti dapat *me-review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan (Moleong, 2017).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat disekitar Taman Nasional Way Kambas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Identifikasi *starting condition* berdasarkan teori Ansel dan Gash dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat disekitar Taman Nasional Way Kambas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Ketidak seimbangan sumber daya

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesiapan Taman Nasional Way Kambas dalam praktik kolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada ketidak seimbangan sumber daya dalam praktik *collaborative governance* di Taman Nasional Way Kambas. Terciptanya kesiapan kolaborasi ini didukung juga oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan spesialisasi kerja untuk saling mengisi segala kekurangan antar *stakeholders* yang terlibat dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

- Insentif (keuntungan) untuk berpartisipasi

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi tahap selanjutnya yaitu insentif yang diberikan kepada *stakeholders* dalam praktik *collaborative governance* telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Balai Taman Nasional Way Kambas serta

mitra-mitranya.

- Adanya ketakutan akan terjadinya konflik

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi pada tahap ketakutan akan terjadinya konflik tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai koordinator utama kolaborasi dalam mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada menjadi suatu proses kolaborasi yang lebih baik dengan terciptanya kebijakan-kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

a. Faktor penghambat, terdiri dari :

- Sumber daya manusia yang melimpah menjadi ancaman tersendiri

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber daya yang melimpah menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat menjadi ancaman tersendiri karena perbedaan pemikiran setiap individu yang dapat memecah kebersamaan dalam mencapai tujuan.

- Ketidak berhasilan sumber daya manusia dalam mengelola lahan

Hasil penelitian ini menerangkan faktor lain yang menghambat dalam *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas adalah luas Taman Nasional.

Way Kambas yang mencapai 1.300 km² yang sulit untuk dikontrol Balai Taman Nasional Way Kambas.

b. Faktor pendukung, terdiri dari :

- Tersedianya area (masyarakat dan mitra dalam lingkup desa penyangga) untuk berkolaborasi

Area yang tersedia menjadi faktor pendukung bagi *stakeholders* untuk bergabung menjalin kolaborasi di Taman Nasional Way Kambas.

- Dukungan pemerintah

Pemerintah sebagai sumber dana dan payung hukum menjadi faktor yang sangat menentukan untuk terbentuknya kolaborasi.

- Partisipasi perguruan tinggi

UNILA sebagai Perguruan Tinggi merupakan faktor pendukung berkolaborasi dalam pengadaan riset dan pemberdayaan tenaga kerja yang ada di Taman Nasional Way Kambas.

- Tersedianya *stakeholders*

Adanya *stakeholders* merupakan salah satu syarat terbentuknya kolaborasi.

5.2.Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang penulis berikan terkait identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam berkolaborasi

Peningkatan sumber daya manusia dalam kolaborasi dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan dalam berkolaborasi membutuhkan sumber daya manusia yang siap pakai apabila ingin kolaborasi berjalan secara optimal dan berhasil sesuai harapan maka wujudkanlah sumber daya manusia yang handal dan siap pakai.

2. Penyatuan visi dan misi serta pemikiran antar *stakeholders*

secara tertulis

Agar tidak ada perbedaan pandangan mengenai penanganan konflik yang dilakukan, seharusnya pihak Balai Taman Nasional Way Kambas membuat tata cara penanganan konflik secara tertulis yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh *stakeholders* yang ikut dalam kolaborasi.

3. Memberikan *reward* terhadap partisipan yang berprestasi

Reward atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga kerja/organisasi yang berprestasi akan memicu persaingan sehat dan akan saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan begitu maka akan terjadi kolaborasi yang berkompetensi tinggi untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Ali, S., and Putri, H. 2017. Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Konflik Gajah dengan Manusia terhadap Konservasi Gajah dan Habitatnya di Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. *Jurnal Biologi Edukasi* 9(1): 16–19.
- Alikodra, H.S. 1990. *Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1*. Buku. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ansell, C. & Gash, A., 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, hlm. 1-29.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2012. *Sekilas Informasi Taman Nasional Way Kambas Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung*. Buku. Balai Taman Nasional Way Kambas. Lampung Timur.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2015. *Sekilas Informasi Taman Nasional Way Kambas*. Lampung. Buku, Taman Nasional Way Kambas. Lampung Timur.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2018. All About Conservation Way Kambas Nasional Park. <https://waykambas.org/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.16.
- Berliani, K., Alikodra, H. S., Masy'ud, B., and Kusri, M. Da. 2016. Social, Economy, Cultural and Community Perception on Sumatran Elephant (*Elephas maximus sumatranus*) Conflict Area in Aceh Province. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research* 27(2): 170–181.
- Bianchi, Carmine. Luis, F. Luna-Reyes. Eliot, Rich Editors. *Enabling Collaborative Governance through Systems Modeling Methods*. Italy : CED
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017*. Buku. Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
- Emerson, Kirk & Tina, Nabatchi. *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC : Georgetown University Press
- Garesetiasih, R., & Kehutanan, K. L. H. D. 2018. Resolusi Konflik Manusia Dengan Satwa Liar Melalui Pengelolaan Kolaboratif.

- Gerungan, W. M. (2020). Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pasca Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Lex et Societatis*, 7:9.
- Harahap, W. H., Patana, P., & Afifuddin, Y. (2012). Mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (Studi kasus Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). *Laporan Hasil Penelitian*. Medan: Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Harjasoemantri, Koesnadi. 2003. "Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20%20koesnadi%20hardjasoemantri.pdf> diakses 22 Januari 2021 Pukul 21.57.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Islamy, S. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Depublish
- Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Junaidi. 2016. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-35.
- Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 16-17.
- Mah, D. N.-y. & Hills, P., 2012. Collaborative Governance for Sustainable Development : Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China. *Sustainable Development Sust. Dev.* 20, Issue 10.I002/sd.466: 85-97.
- Moleong, L. J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 penyunt. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuryasin, ., Yoza, D., and Kausar, . 2014. Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) terhadap Manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Pertanian* 1(2): 119–127.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedi Widiasana Indonesia.
- Report of The Secretariat*, Available Online: <http://unpan1.un.org/intradoe/groups/public/documents/un/unpan015105.pdf>. Diakses pada tanggal 22 januari 2021 pukul 10.05.
- Rosidi, Abidarin. 2013. *Reinventing Government Demokrasi dan Revormasi Pelayana Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.

- Santoso, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refrika Aditama.
- Sari, M. P. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Sher-Hadar, Neta, Lihi, Lahat, Itzhak, Galnoor. *Collaborative Governance*
- Sinaga, M. S. (2019). Bank Desa Sebagai Inovasi Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan melalui Strategi Kemitraan dan Tata Kelola. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 2(2), 41-52.
- Sinjai, P. K. I. B., & Cahyono, S. Collaborative Governance Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika DI Lembaga.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Sukatmoko. 2006. *Sampai Kapankah Gajah Jadi "Musuh" Petani?: Warta Konservasi Edisi IV*. Buletin. Balai Taman Nasional Way Kambas. Lampung Timur.
- Syafe, M. (2020). Aktualisasi Kapasitas Stakeholders dalam Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) Berbasis Collaborative Governance (Studi Kasus di Kelurahan Sukarame).
- Syafei, M., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) Berbasis Collaborative Governance Melalui Partisipasi Stakeholders (Studi di Kelurahan Sukarame). *Jurnal Administrativa*, 2(1), 15-29.
- Theory and Lessons from Israel*. Israel : Palgrave macmillan.
- Tresiana, N. & Duadji, N., 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. 1 ed. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Tresiana, N. & Duadji, N., 2018. Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance Governance. *Jurnal Studi Gender*, 13 (1) : 1-22.
- Vesswic. 2013. *Sumatran Elephants and Mahouts Working for Conservation Elephant through Conservation Response Unit of Way Kambas, Lampung, Sumatra*. Laporan. Vesswic. Lampung Timur.

Sumber lain :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999
- Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 5 dan 7 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut/II/2008
Tentang Prosedur Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan
Manusia.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana